

## **SKRIPSI**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA SURIAMEDAL KECAMATAN SURIAN KABUPATEN SUMEDANG**

Disusun Oleh :

**NAMA : LUTFI YULIANI**  
**NOMOR POKOK : E. 1735223015**  
**PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam  
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)  
STIA Sebelas April Sumedang



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

**2021**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

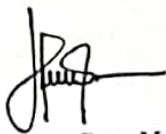
Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN LUMBUNG PANGAN  
MASYARAKAT DI DESA SURIAMEDAL KECAMATAN SURIAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Skripsi:

Pembimbing I,



Suherman, Drs., M.Si.  
NIDN. 04-1603-6702

Pembimbing II,



Irma Hermavanti, S.Pd., M.Si.  
NIDN. 04-1811-7901

Mengetahui :

Ketua STIA Sebelas April Sumedang,



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si.  
NIDN. 04-3012-7102

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NAMA : LUTFI YULIANI**  
**NPM : E.1735223015**  
**PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN  
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA  
SURIAMEDAL KECAMATAN SURIAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

Telah mempertahankan Skripsi ini dihadapan Panitia Penguji Skripsi  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

**Hari : Sabtu**  
**Tanggal : 21 Agustus 2021**  
**Waktu : 12.30 WIB s/d Selesai**

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

Panitia Penguji Skripsi:

**Ketua Sidang : Dadan Setia Nugraha, S.Sos.,M.Si** (.....)  
**Sekretaris : Lalas Sulastri, S.Sos.,M.Si** (.....)  
**Pembimbing I : Suherman, Drs., M.Si** (.....)  
**Pembimbing II : Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si** (.....)

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI NEGARA (STIA)  
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

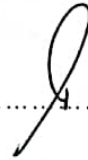
Judul Skripsi:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN LUMBUNG PANGAN  
MASYARAKAT DI DESA SURIAMEDAL KECAMATAN SURIAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

Telah melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan koreksi Dosen Penguji pada  
Ujian Sidang Skripsi

Tim Penguji Skripsi:

Penguji I : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si (.....)



Penguji II : Edi Setiawan, S.Sos., M.Si (.....)



Penguji III : Hj. Fepi Febianti, S.Sos., M.I.Kom (.....)



## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA SURIAMEDAL KECAMATAN SURIAN KABUPATEN SUMEDANG**” ini, sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, Agustus 2021  
Yang membuat pernyataan,

**LUTFI YULIANI**  
**E.1735223015**



## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA SURIAMEDAL KECAMATAN SURIAN KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh:

**NAMA** : LUTFI YULIANI  
**NOMOR POKOK** : E. 1735223015  
**PROGRAM STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

146 halaman, 5 bab, 63 tabel, 6 gambar, 8 lampiran  
daftar Pustaka: 20 buku, 6 dokumen/peraturan, 8 sumber lain.

Metode yang dilakukan dalam penyusunan laporan ini adalah metode kualitatif (*natural setting*) dengan jenis deskriptif. Penentuan sasaran diambil dengan menggunakan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*) dimana objeknya adalah pelaksana kebijakan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah empat orang yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua lumbung dan Anggota kelompok tani. Teknik pengumpulan data melalui study kepustakaan, study lapangan (observasi, wawancara mendalam dokumentasi) dan Triangulasi. Sedangkan prosedur pengolahan data ditempuh dengan mengacu pada operasi dasar mengutip dari model Mailes dan Huberman yang dikutip oleh Sugiono (2020: 134).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menemukan bahwa Implementasi kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat Di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang masih cukup rendah. Hal ini terlihat dari beberapa hambatan. Hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat Di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang sebagai berikut: Kurangnya sosialisasi mengenai penerapan lumbung kepada masyarakat, pengaruh kondisi lingkungan, kurangnya koordinasi dan Kurangnya partisipasi masyarakatnya mengenai lumbung tersebut.

Upaya-upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut adalah: Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan adanya penerapan lumbung, meningkatkan stabilitas Lingkungan (ekonomi, sosial, geografis dan politik), menciptakan koordinasi yang baik, dan meningkatkan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan

## **ABSTRACT**

### ***POLICY IMPLEMENTATION OF COMMUNITY FOOD BARNES IN SURIAMEDAL VILLAGE SURIAN SUBDISTRICT SUMEDANG DISTRICT***

*Compiled by:*

**NAME** : LUTFI YULIANI  
**ROOTE NUMBER** : E. 1735223015  
**STUDY PROGAM** : **PUBLIC ADMINISTRATION**

*146 pages, 5 chapter, 63 tables, 6 picture, 8 appendices  
bibliopgraphy: 20 books, 6 documents/regulations, 8 another resources.*

*The method used in the preparation of this report is a qualitative method (natural setting) with a descriptive type. determination of targets by using a purposive sampling technique where the target is the implementer of the policy with certain considerations. The samples in this study were four people, namely the village head, the head of the BPD, the head of the barn and members of the farmer group. Data collection techniques through library research, field studies (observations, in-depth interviews, documentation) and triangulation. While the data processing procedure is achieved by referring to the basic operations quoting from the Mailes and Huberman model cited by Sugiono (2020: 134).*

*Results Based on the research and discussion, the researcher found that the implementation of the Policy for the Implementation of Community Food Barns in Suriamedal Village, Surian District, Sumedang Regency was still quite low. This can be seen from several obstacles. The obstacles to the implementation of the policy on the implementation of community food barns in Suriamedal Village, Surian District, Sumedang Regency are as follows: Lack of socialization regarding the application of barns to the community, the influence of environmental conditions, lack of coordination and lack of community participation regarding the barns.*

*Efforts to overcome these obstacles are: Increasing socialization to the community regarding the application of granaries, improving the environment (economic, social, and political), creating good coordination, and increasing support for quality human resources.*

**Keywords:**

***Policy***

***Implementation***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA SURIAMEDAL KECAMATAN SURIAN KABUPATEN SUMEDANG”**.

Penyusunan proposal penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menempuh seminar usulan proposal penelitian pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.

Dalam penyusunan proposal penelitian ini tentunya banyak hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya terutamatepada:

1. Yth. Bapak H. Yuyun Hidayat, Drs. selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang;
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang;
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos.,M.Si. selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang;
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan S.Pd., M.Pd. selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang;
5. Yth. Ibu Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si. selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
6. Yth. Ibu Lalas Sulastri, S.Sos.,M.Si. selaku KA. Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang;
7. Yth. Bapak Suherman, Drs., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;

8. Yth. Seluruh Dosen dan Staf Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang yang telah membekali ilmu yang bermanfaat;
9. Yth. Bapak Narta, selaku Kepala Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang;
10. Yth. Seluruh Pegawai Desa Surimedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang;
11. Orang tua tercinta yang mana telah memberikan dukungan moril, materil serta do'a yang tiada henti selama penyusunan proposal penelitian ini;
12. Rekan-rekan Mahasiswa STIA Sebelas April Sumedang serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal penelitian ini yang tidak bisa disebutkan satu persatunya.

Peneliti menyadari bahwa penulisan proposal penelitian ini masih jauh sekali dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulis. Untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya dan semoga amal kebaikan dari semuanya mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin

Sumedang, Agustus 2021

**LUTFI YULIANI**  
**E.1735223015**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hakekat Administrasi Negara .....	10
1. Pengertian Administrasi Negara .....	10
2. Ciri-Ciri Administrasi Negara .....	11
3. Ruang Lingkup Administrasi Negara .....	12
4. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian .....	14
B. Kebijakan Publik .....	14
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	19
2. Urgensi Kebijakan Publik.....	17

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	18
4. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik .....	19
5. Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	20
6. Jenis Kebijakan Publik.....	21
C. Implementasi Kebijakan .....	23
1. Pengertian Kebijakan.....	23
2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan.....	25
3. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	26
4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	28
5. Upaya-Upaya Implementasi Kebijakan.....	28
6. Lumbung Pangan Masyarakat .....	29
D. Kajian Penelitian Terdahulu .....	37
E. Kerangka Pemikiran dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	41
1. Kerangka Pemikiran .....	41
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	44

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Desain Penelitian .....	45
B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian .....	48
1. Penentuan Sasaran .....	48
2. Informan Penelitian .....	50
C. Teknik Pengumpulan Data .....	50
D. Prosedur Pengolahan Data .....	52
E. Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	55
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	55
2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas pada Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang .....	58
a. Struktur Organisasi.....	58

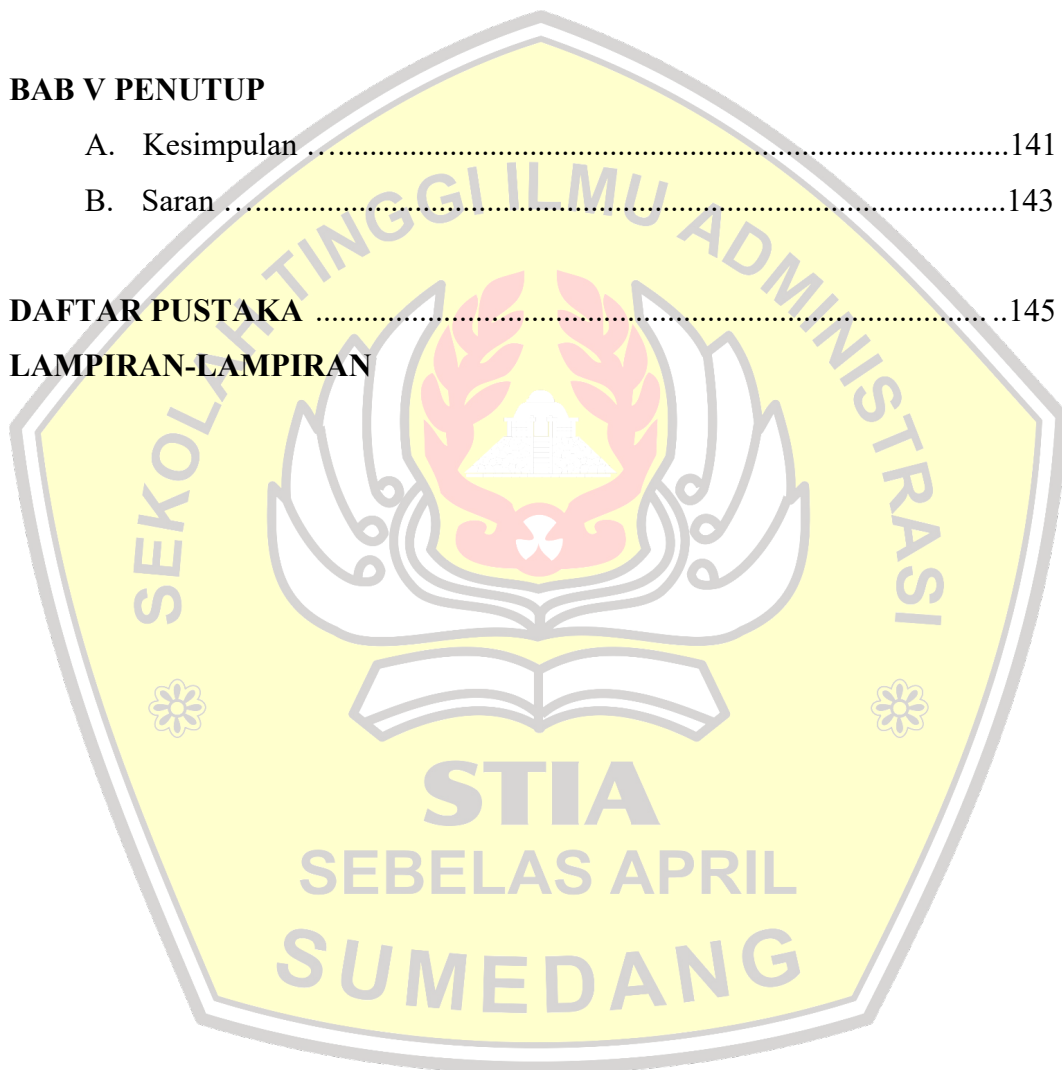
b. Uraian Tugas dan Fungsi Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang .....	59
B. Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat Di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten .....	63
C. Faktor-faktor Penghambat Keberhasilan Program .....	97
D. Upaya-upaya Mengatasi Hambatan Program .....	118

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	141
B. Saran .....	143

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	145
-----------------------------	-----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu .....	38
Tabel 2.2 Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian .....	42
Tabel 3.1 Sasaran Penelitian .....	48
Tabel 3.2 Informan Penelitian .....	49
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .....	53
Tabel 4.3 Reduksi hasil wawancara mengenai Kejelasan Ukuran Keberhasilan .....	65
Tabel 4.4 Triangulasi pengumpulan data mengenai kejelasan ukuran keberhasilan .....	66
Tabel 4.5 Reduksi hasil wawancara mengenai Adanya Tujuan Kejelasan.....	67
Tabel 4.6 Triangulasi pengumpulan data mengenai adanya tujuan kejelasan.	68
Tabel 4.7 Reduksi hasil wawancara mengenai Sumber Daya Manusia.....	69
Tabel 4.8 Triangulasi pengumpulan data mengenai sumber daya manusia.....	70
Tabel 4.9 Reduksi hasil wawancara mengenai Anggaran/Biaya .....	72
Tabel 4.10 Triangulasi pengumpulan data mengenai Anggaran/Biaya .....	72
Tabel 4.11 Reduksi hasil wawancara mengenai Sarana dan Prasarana .....	74
Tabel 4.12 Triangulasi pengumpulan data mengenai sarana dan prasarana .....	75
Tabel 4.13 Reduksi hasil wawancara mengenai Keseimbangan Cakupan Wilayah dengan Jumlah Agen pelaksanaan .....	76
Tabel 4.14 Triangulasi pengumpulan data mengenai Keseimbangan Cakupan Wilayah dengan Jumlah Agen pelaksanaan.....	78
Tabel 4.15 Reduksi hasil wawancara mengenai Adanya Tanggungjawab .....	79
Tabel 4.16 Triangulasi pengumpulan data mengenai adanya tanggungjawab ..	80
Tabel 4.17 Reduksi hasil wawancara mengenai Respon Agen Pelaksana Dan Masyarakat .....	81
Tabel 4.18 Triangulasi pengumpulan data mengenai respon agen pelaksana dan masyarakat.....	83
Tabel 4.19 Reduksi hasil wawancara mengenai Adanya Koordinasi .....	84

Tabel 4.20 Triangulasi pengumpulan data mengenai adanya koordinasi .....	85
Tabel 4.21 Reduksi hasil wawancara mengenai Kejelasan Informasi .....	87
Tabel 4.22 Triangulasi pengumpulan data mengenai kejelasan informasi .....	88
Tabel 4.23 Reduksi hasil wawancara mengenai Faktor lingkungan .....	89
Tabel 4.24 Triangulasi pengumpulan mengenai faktor lingkungan.....	91
Tabel 4.25 Reduksi hasil wawancara mengenai Pandangan Masyarakat .....	92
Tabel 4.26 Triangulasi pengumpulan mengenai pandangan masyarakat.....	93
Tabel 4.27 Rekapitulasi Implementasi Kebijakan .....	94
Tabel 4.28 Reduksi hasil wawancara mengenai Belum Stabilmnya Kondisi Lingkungan (Ekonomi,Sosial,Geografis dan Politik) .....	98
Tabel 4.29 Triangulasi pengumpulan mengenai belum stabilnya kondisi lingkungan (ekonomi,sosial,geografis dan politik).....	99
Tabel 4.30 Reduksi hasil wawancara mengenai Kurangnya Intensitas Pemberian Informasi .....	101
Tabel 4.31 Triangulasi pengumpulan mengenai kurangnya intensitas pemberian informasi.....	103
Tabel 4.32 Reduksi hasil wawancara mengenai Kurangnya Koordinasi.....	104
Tabel 4.33 Triangulasi pengumpulan mengenai kurangnya koordinasi .....	105
Tabel 4.34 Reduksi hasil wawancara mengenai Masih Kurangnya Partisipasi Masyarakat .....	107
Tabel 4.35 Triangulasi pengumpulan mengenai masih kurangnya partisipasi masyarakat.....	108
Tabel 4.36 Reduksi hasil wawancara mengenai Kurangnya Dukungan Finansial .....	109
Tabel 4.37 Triangulasi pengumpulan mengenai kurangnya dukungan finansial .....	110
Tabel 4.38 Reduksi hasil wawancara mengenai Kurangnya Pemahaman Implementor.....	112
Tabel 4.39 Triangulasi pengumpulan mengenai Kurangnya Pemahaman Implementor.....	113

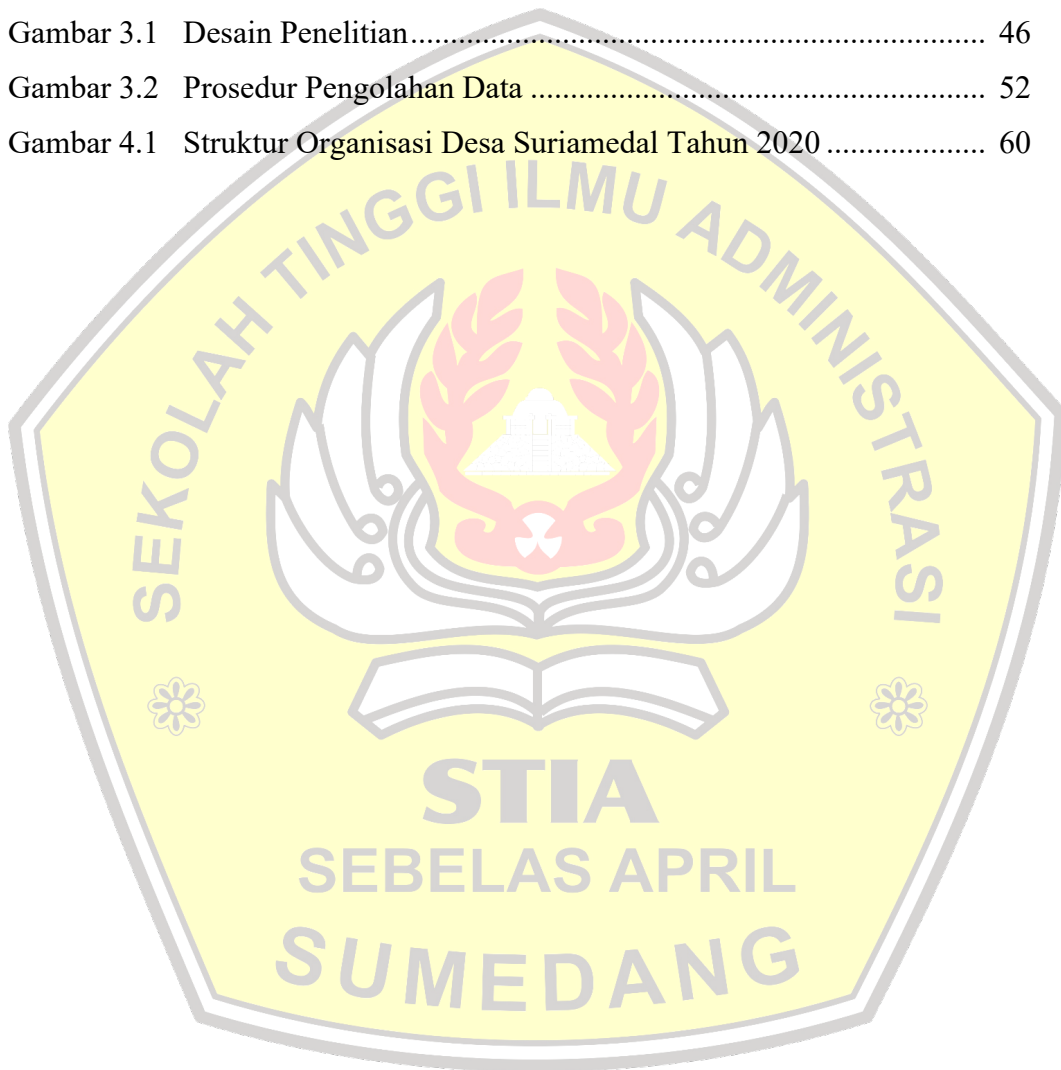
Tabel 4.40 Reduksi hasil wawancara mengenai Kurangnya Pengawasan Dari Pimpinan.....	114
Tabel 4.41 Triangulasi pengumpulan mengenai kurangnya pengawasan dari pimpinan.....	115
Tabel 4.42 Rekapitulasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan .....	116
Tabel 4.43 Reduksi hasil wawancara mengenai Stabilitas Kondisi Lingkungan.. (Ekonomi,Sosial,Geografis dan Politik).....	121
Tabel 4.44 Triangulasi pengumpulan mengenai stabilitas kondisi lingkungan .... (ekonomi,sosial,geografis dan politik) .....	122
Tabel 4.45 Reduksi hasil wawancara mengenai Intensitas Informasi Terpenuhi .....	124
Tabel 4.46 Triangulasi pengumpulan mengenai intensitas informasi terpenuhi .....	125
Tabel 4.47 Reduksi hasil wawancara mengenai Terciptanya Koordinasi Yang Baik .....	126
Tabel 4.48 Triangulasi pengumpulan mengenai terciptanya koordinasi yang baik	127
Tabel 4.49 Reduksi hasil wawancara mengenai Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas .....	129
Tabel 4.50 Triangulasi pengumpulan mengenai meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas .....	130
Tabel 4.51 Reduksi hasil wawancara mengenai Dukungan Sumberdaya Finansial	132
Tabel 4.52 Triangulasi pengumpulan mengenai dukungan sumberdaya finansial .....	133
Tabel 4.53 Reduksi hasil wawancara mengenai Meningkatkan Pemahaman Implementor .....	134
Tabel 4.54 Triangulasi pengumpulan mengenai meningkatkan pemahaman implementor .....	135
Tabel 4.53 Reduksi hasil wawancara mengenai Meningkatkan Pengawasan Dari Pimpinan.....	137
Tabel 4.54 Triangulasi pengumpulan mengenai meningkatkan pengawasan dari pimpinan.....	137

Tabel4.57 Rekapitulasi Upaya-upaya Mengatasi Hambatan Implementasi  
Kebijakan ..... 138



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Produk Padi di Desa Suriamedal .....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	46
Gambar 3.2 Prosedur Pengolahan Data .....	52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Suriamedal Tahun 2020 .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua STIA Sebelas April Sumedang Nomor 0032/SK/D-STIA/UN/K/I/2021 Tentang Penetapan Mahasiswa Penyusun Skripsi, Judul Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2020/2021 Gelombang II.
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Lembaga STIA Sebelas April Sumedang
- Lampiran 3 Surat Pemberian Izin Penelitian dari Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Pedoman Observasi
- Lampiran 6 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 7 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis yang bersifat musiman, terbatas dan tersebar antara wilayah yang tersedia bagi masyarakat yang harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu. Mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan bahwa terwujudnya ketahanan pangan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, terjangkau harga pangan oleh masyarakat, dan terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan bagi masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan tersebut.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkatkan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan,

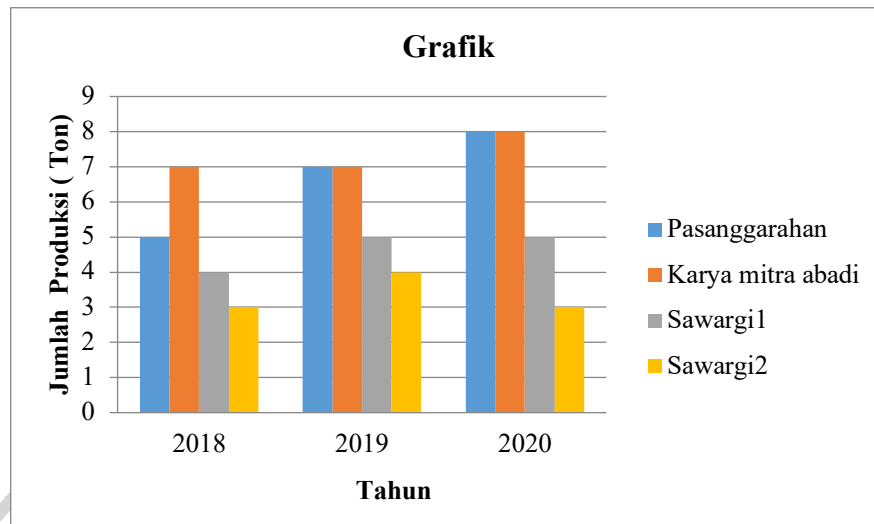
perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka. Umumnya terdiri dari dua elemen pokok, yaitu pasokan (kecukupan) dan keterjangkauan (aksesibilitas) pangan, yang di dalamnya mencakup aspek stabilitas produksi, kebijakan harga, distribusi, dan konsumsi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 tentang pangan menyatakan bahwa cadangan pangan nasional merupakan ketersediaan pangan yang ada di wilayah Indonesia sebagai produk konsumsi manusia serta sebagai antisipasi gangguan pasokan dan harga, kekurangan pangan, dan keadaan darurat. Dari adanya Undang-undang tersebut, maka terbentuklah peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menjelaskan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam hal pertahanan. Mengingat pentingnya pangan maka diperlukan adanya upaya ketahanan pangan yang baik yang dilandasi dengan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagai ruhnya. Kelembagaan cadangan pangan yang berkembang di masyarakat adalah lumbung pangan, dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 bahwa pengembangan lumbung pangan masyarakat merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan untuk pencapaian sasaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Maka dari itu Lumbung pangan adalah suatu bentuk kelembagaan pangan masyarakat yang berperan dalam menyediakan stok pangan pada saat musim paceklik atau saat terjadi gagal panen. Keberadaan lumbung pangan tersebut sangatlah penting bagi masyarakat karena dapat digunakan untuk mengelola cadangan pangan Desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan pada suatu kondisi tertentu. Setiap daerah tentu mempunyai potensi, sumber daya, kendala dan permasalahan yang berbeda dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing sebagai akibat perbedaan penguasaan teknologi, kelembagaan pendukung, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan infrastruktur. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan terkait ketahanan pangan tidak bisa lagi dilihat secara general (Ariani, 2010), tetapi harus spesifik sesuai karakteristik masing-masing daerah agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran serta berdampak nyata bagi masyarakat di daerah pelaksana program pembangunan. Lumbung pangan juga dapat berfungsi sebagai penyangga harga gabah, karena anggota kelompok lumbung pangan biasanya akan meminjam gabah pada saat musim paceklik dan mengembalikannya pada saat panen raya tiba. Dengan demikian, petani tidak perlu lagi menjual seluruh gabahnya saat panen raya ketika harga gabah cenderung sangat rendah. Petani dari anggota lumbung juga biasanya dapat meminjam modal usahatani seperti uang, pupuk, pestisida, dan berbagai sarana produksi lainnya. Karena kegiatan usaha lumbung pangan tidakhanya terfokus pada kegiatan simpan pinjam gabah, tetapi juga pada kegiatan simpan pinjam berbagai sarana produksi pertanian. Begitu pun dengan peran masyarakat dalam

pengelolaan lumbung pangan tercermin dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawal jalannya pengelolaannya lumbung pangan berupa dukungan baik dengan memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh lumbung pangan masyarakat desa ataupun dukungan dalam kegiatan lainnya begitupun sebaliknya. Namun dalam hal ini peran masyarakat masih cenderung terbatas pada eksistensi lumbung pangan itu sendiri, karena tidak semua masyarakat sekitar berada pada garis pekerjaan dan bidang yang sama sehingga mempengaruhi peranan yang ada. Karena peran masyarakat pada pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa yang cenderung aktif akan berbeda dengan peran masyarakat pada pengelolaan lumbung pangan yang cenderung pasif.

Lumbung pangan masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang digunakan sebagai sarana usaha simpan pinjam gabah, untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat terutama pada musim paceklik atau saat gagal panen. Yang sudah terbentuk pada Tahun 2009 sampai sekarang dan dimodali oleh Pemerintah, sebelum mendapatkan bantuan dari pihak Pemerintah membentuk lumbung pangan masyarakat dengan dilakukan dengan modal patungan masyarakat sekitar yang didukung oleh Desa Suriamedal dan masyarakat sekitar. Lumbung pangan masyarakat di Desa Suriamedal mendapatkan bantuan dari Pemerintah sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2015, 2018, dan 2020. Bantuan tersebut digunakan untuk membuat bangunan lumbung dan pengisian lumbung termasuk stok pupuk dan pestisida. Lumbung pangan masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, sudah memiliki 4 (empat) kelembangaan lumbung pangan masyarakat yang tersebar di

setiap RW Desa Suriamedal Kecamatan Surian yang dikelola oleh masyarakat sekitar.



**Gambar 1.1**  
**Jumlah produksi padi di Desa Suriamedal**

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Dari grafik diatas jumlah produksi padi di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang kelompok tani pasanggrahan, karya mitra abadi, sawargi 1, dan sawargi 2 dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut terlihat pada kelompok tani pasanggrahan, karya mitra abadi dan sawargi 1 pada tahun 2018 mengalami kenaikan sampai 2020 yang menghasilkan 8 (delapan) ton produksi padi. Sedangkan kelompok tani sawargi 2 mengalami penurunan ditahun 2020 yang menghasilkan 3 (tiga) ton produksi padi yang disebabkan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap produksi padi tersebut. Lumbung pangan tersebut difungsikan sebagai lembaga simpan pinjam gabah, untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat terutama pada musim paceklik atau saat gagal panen. Mekanisme kegiatan kelembagaan lumbung pangan dilakukan dalam bentuk simpan pinjam gabah.

Para anggota akan meminjam gabah di lumbung pangan ketika stok pangan mereka telah habis. Pada saat memasuki musim tanam padi, lumbung dibongkar kemudian para anggota lumbung meminjam gabah dengan besaran tertentu yang dicatat oleh pengurus lumbung. Para anggota lumbung juga dapat meminjam gabah kapan saja selama stok gabah di dalam lumbung masih ada. Pada saat panen tiba, para anggota kemudian akan membayar hutang pinjaman gabah kepada lumbung pangan, ditambah bunga peminjaman dengan besaran tertentu apabila anggota lumbung tidak menegembalikan tepat waktu. Besaran bunga pinjaman tersebut ditentukan berdasarkan pada kesepakatan bersama. Bunga pinjaman tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan lumbung pangan itu sendiri. Kegiatan pembongkaran lumbung dan pengembalian pinjaman gabah biasanya dilakukan pada setiap musim tanam, sehingga anggota lumbung juga dapat memperoleh pembagian sisa hasil usaha dari kegiatan tersebut. Sisa hasil usaha lumbung pangan tersebut dapat berupa gabah, uang tunai, atau berbagai bahan pangan pokok lainnya, namun dalam pengimplementasiannya masih belum optimal.

Berdasarkan observasi awal di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, diketahui bahwa terdapat beberapa indikasi yang mengarah pada Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Masyarakat yang belum optimal, dengan gejala-gejala antara lain:

1. Masih belum stabilnya faktor/kondisi lingkungan yang dapat menghambat proses pelaksanaan lumbung pangan di Desa Suriamedal. Hal ini dilihat dari

keadaan lingkungan yang tidak menentu seperti curah hujan yang tinggi, dan terjadinya hama sehingga berimbas pada sektor pertanian.

2. Masih kurangnya koordinasi antara pengelola dengan pihak Desa terkait pengelolaan lumbung di Desa Suriamedal.

Contoh: Tidak adanya pelaporan terkait pengelolaan lumbung pangan oleh pengelola kepada pihak desa. Dimana seharusnya pelaporan ini dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pihak Desa.

3. Belum adanya sosialisasi dari pihak Desa kepada masyarakat mengenai lumbung pangan. Hal ini dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui manfaat lumbung pangan di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.

Dengan adanya latar belakang dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas dari hasil observasi awal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA SURIAMEDAL KECAMATAN SURIAN KABUPATEN SUMEDANG”**.

#### **B. Fokus Permasalahan**

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang?

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya dari mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan guna dan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait baik secara teoritis maupun praktis.

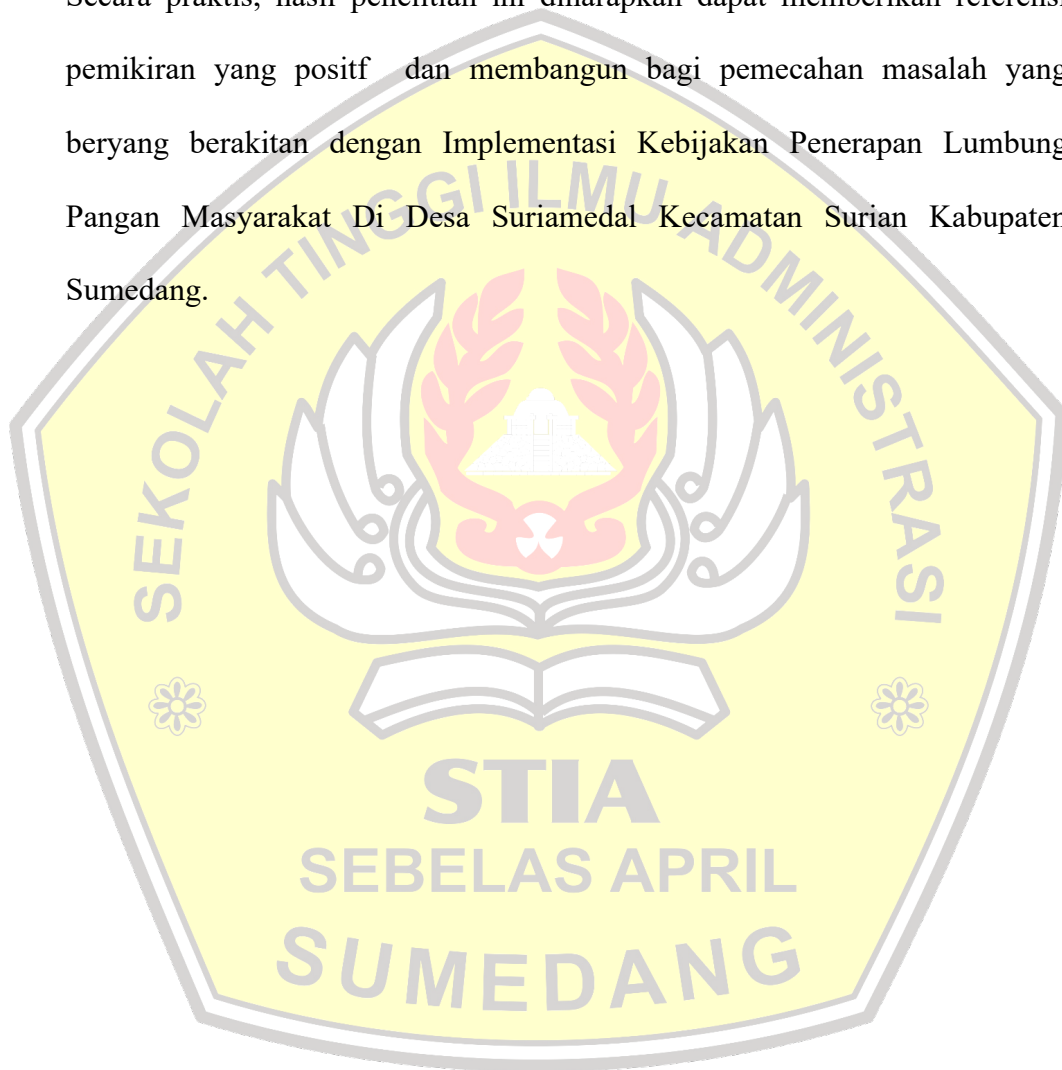
1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan nilai tambah kontribusi bagi pengembangan konsep-konsep dan teori-teori ilmu Administrasi Negara dan Manajemen Pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam hal

yang mengenai Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang beryang berakitan dengan Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat Di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hakikat Adminsitirasi Negara**

##### **1. Pengertian Adminsitirasi Negara**

Dalam aktualisasinya administrasi dapat dilakukan terhadap berbagai bidang kegiatan, sehingga lahir konsep-konsep lain seperti administrasi publik atau administrasi Negara. Konsep administrasi publik juga dikemukakan oleh para pakar melalui pernyataan yang beraneka ragam.

Menurut Gordon dalam Indradi (2016: 108) mengemukakan bahwa “Administrasi Negara merupakan seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan”.

Menurut Starling dalam Indradi (2016: 107) mengemukakan bahwa Administrasi Negara adalah semua yang dicapai pemerintah, yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan”.

Sedangkan menurut Abdurrachman dalam Indradi (2016: 108) menyebutkan Administrasi Negara, yaitu ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.

Berdasarkan uraian di atas penulis mempunyai gambaran bahwa Administrasi Negara adalah Suatu aktifitas para pejabat politik atau pejabat

negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum sesuai dengan hak dan kewenangan politiknya.



## 2. Ciri-Ciri Administrasi Negara

Sebagaimana kita tahu bahwa suatu organisasi terdiri dari dua sektor yaitu organisasi publik dan organisasi swasta. Organisasi publik dalam hal ini yang menjadi pelaksana administrasi negara memiliki ciri khusus yang berbeda apabila dibandingkan dengan organisasi swasta atau organisasi privat.

Menurut Caiden dalam Revida dkk (2020: 4), menyatakan ada 7 (tujuh) hal yang menjadi ciri administrasi publik, yaitu.

1. Kehadiran administrasi negara tidak bisa dihindari.
2. Administrasi negara mengharapakan kepatuhan.
3. Administrasi negara mempunyai prioritas.
4. Administrasi negara mempunyai kekecualian.
5. Manajemen puncak administrasi negara adalah politik.
6. Penampilan administrasi negara sulit diukur.
7. Lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara.

Di sisi lain Thoha dalam Revida dkk (2020: 4-5) memberi batasan ciri-ciri administrasi negara sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan bersifat urgen (penting) jika dibandingkan dengan organisasi-oragnisasi swasta.
2. Pelayanan yang diberikan pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.
3. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berarti mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
4. Pelayanan yang diberikan tidak dikendalikan oleh pasar.
5. Usaha-usaha yang dilakukan sangat tergantung pada penilaian rakyat.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa administrasi negara sangat erat hubungan dengan kepentingan masyarakat, dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak lepas pada pengaruh politik.

### 3. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Dalam suatu administrasi negara terdapat beberapa ciri-ciri yang dikemukakan di sini bukanlah bermaksud untuk memberikan batas yang sempit dari disiplin administrasi negara, melainkan untuk lebih mengenalnya agar diperoleh pemahaman yang komprehensif.

Salah satu persoalan dalam beberapa paradigma administrasi negara seperti yang telah diuraikan di muka ialah adanya usaha untuk membedakan antara Negara (*public*) dalam istilah administrasi negara dengan swasta atau perusahaan (*private organization*). Ada sementara pihak yang menyatakan bahwa keduanya sulit dibedakan, dan ada pula yang menyatakan bahwa keduanya bisa dibedakan. Penggunaan istilah negara dalam administrasi negara memberikan kesan seakan-akan administrasi negara tersebut tidak mencampuri urusan-urusan swasta. Barangkali kalau diketahui ciri-ciri dari administrasi negara, maka persoalan tersebut akan bisa dijawab. Menurut Henry dalam Anggara (2018: 74) ciri-ciri tersebut adalah:

1. Kegiatan yang tidak bisa dihindari (*Unavoidable*), titik tekanannya yang mendasar adalah dalam hubungannya antara Negara dan Masyarakat bersifat pasti.
2. Monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya. Negara memiliki kewenangan untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum, kekuasaan untuk melaksanakan paksaan dipahami sebagai *coercive power*, administrasi negara merupakan penjelmaan dari hal tersebut dan diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara, seperti kepolisian, kehakiman dan lainnya.
3. Prioritas, administrasi negara mengandung tanggung jawab moral untuk mensejahterakan masyarakat sehingga memiliki prioritas dalam memberikan arahan ataupun layanan.
4. Ukuran yang tidak terbatas, lingkup masyarakat di negara meliputi batasan territorial suatu negara, yang didalamnya terdapat administrasi negara.

#### **4. Kaitan Administrasi Negara Dengan Variabel Penelitian**

Studi tentang pelaksanaan kebijakan publik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau mempunyai keterkaitan dengan administrasi negara. Adanya definisi administrasi negara mengalami revisi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik menurut para ahli, sebagian diantaranya akan dituangkan oleh peneliti.

Definisi administrasi negara yang mengalami revisi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik seperti yang dikemukakan oleh Gordon dalam Indradi (2016: 108) mengemukakan bahwa “Administrasi negara merupakan seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan”.

Menurut Starling dalam Indradi (2016: 107) mengemukakan bahwa “Administrasi negara adalah semua yang dicapai pemerintah, yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan”.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa birokrasi lembaga legislatif, lembaga peradilan merupakan badan atau lembaga administrasi negara dan merupakan aktor yang terlibat sebagai badan atau lembaga yang merumuskan kebijakan maupun sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut.

Pendapat di atas semakin memperjelas pemahaman peneliti bahwa pelaksana kebijakan memiliki keterkaitan atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan administrasi negara, karena orang-orang yang berada didalam suatu organisasi

pemerintah atau para administrator negara merupakan orang-orang yang harus merumuskan dan mengimplementasikan atau melaksanakan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh para administrator tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah suatu ilmu yang luas, dalam kajian ilmu administrasi negara banyak menyangkut dan mempelajari kebijakan publik baik itu pelaksanaannya maupun perumusannya yang dilakukan oleh para administrator negara. Pelaksanaan kebijakan dijalankan oleh para pelaku administrasi negara untuk mengatasi ataupun mencari solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah dengan memberlakukan kebijakan politik untuk dirumuskan sekaligus dilaksanakan.

## **B. Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

Sebelum penulis lebih jauh memaparkan tentang Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pagan Masyarakat yang ada di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, terlebih dahulu penulis kemukakan definisi kebijakan publik menurut para ahli.

Menurut Anderson dalam Winarno (2012: 21) menyatakan bahwa “Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.

Sedangkan menurut Friedrich dalam Winarno (2012: 20) menyatakan bahwa:

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan- hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka

mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Rose dalam Winarno (2012: 20) menyatakan bahwa “Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri”.

Dari definisi ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu proses yang mencakup tahap implementasi atau pelaksanaan yang mempunyai arah dan tujuan. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada didalam masyarakat. Apabila kebijakan tersebut berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Selain itu jika dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

Menurut Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2011: 93) mendefinisikan bahwa “Kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*)”.

Sedangkan, menurut Friedrick dalam Nugroho (2011: 93) menyatakan bahwa:

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan.

Selanjutnya, Dye dalam Nugroho (2011: 94) mengemukakan bahwa “Kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan berasa tampil berbeda (*what government do, why they do it, and what difference it makes*)”.

Sedangkan menurut Eyestone dalam Winarno (2012: 20) menyatakan bahwa Kebijakan Publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu lingkup kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau publik dan juga aktor pejabat pemerintah yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah ataupun kelompok lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melihat pelaksanaan dari adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pasal 1 tentang pangan menyatakan bahwa cadangan pangan nasional merupakan ketersediaan pangan yang ada di wilayah Indonesia sebagai produk konsumsi manusia serta sebagai

antisipasi gangguan pasokan dan harga, kekurangan pangan, dan keadaan darurat. Sehingga terbentuk peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menjelaskan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam hal pertahanan.

## 2. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan public menurut Wahab dalam Suharno (2016: 6) sebagai berikut:

Studi kebijakan publik mencakup upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai publik, penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.

Wahab dalam Suharno (2016: 8-9) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting untuk dipelajari, yaitu:

### a. Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel *independen* jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b. Alasan Professional

Studi kebijakan public dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah social sehari-hari.

c. Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

### 3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan public membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam megkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Pasolong (2019: 49) adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Penyusunan Agenda

Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain di tetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang sama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk kepada agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/ policy options*) yang ada. Sama hal nya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk merain dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, di tentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

#### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Setiap adminisator dituntut memiliki kemampuan/keahlian, tanggungjawab dan kemauan, sehingga dapat membuat kebijaksanaan dengan segala risikonya, baik yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan menurut Nigro dan Nigro dalam Anggara (2018: 174-175):

a. Adanya Pengaruh Tekanan dari Luar

Proses dan prosedur pembuatan keputusan tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya.

b. Adanya Pengaruh Kebiasaan Lama

Kebiasaan lama organisasi (Nigro menyebutnya dengan istilah *sunk costs*) seperti kebiasaan investasi modal, sumber dan waktu sekali dipergunakan untuk membiayai program tertentu, cenderung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para administrator kendatipun keputusan yang

berkenaan telah dikritik dan perlu diubah. Kebiasaan lama itu akan terus diikuti apabila suatu kebijaksanaan yang telah ada dipandang memuaskan.

c. Adanya Pengaruh Sifat-sifat Pribadi

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti dalam proses penerimaan/pengangkatan pegawai baru, faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar.

d. Adanya Pengaruh dari Kelompok Luar

Lingkungan social dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan, seperti masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan.

e. Adanya Pengaruh Keadaan Masa Lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Misalnya, orang sering membuat keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain karena khawatir wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan disalahgunakan.

## 5. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2016: 14-15) ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c. Kebijakan bersangkutan-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

## 6. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Anderson dalam Anggara (2018: 55-56) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural  
Kebijakan substantif adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Sedangkan Kebijakan Prosedural adalah kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*).
- b. Kebijakan distributif, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributif  
Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.
- c. Kebijakan material dan kebijakan simbolik  
Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya kompleks pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)  
Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Winarno (2007: 21-22) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Tuntutan Kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b. Keputusan Kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan status (ketentuan-ketentuan dasar), ketepatan-ketepatan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan Kebijakan (*policy statements*)

Yaitu pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan public tertentu. Misalnya, ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran Kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil Akhir Kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Dun (2003: 21) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi 5 (lima)

bagian, yaitu:

A. Masalah Kebijakan (*policy public*)

Yaitu nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya masalah maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

B. Alternatif Kebijakan (*policy alternatives*)

Adalah arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan.

Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

C. Tindakan kebijakan (*policy actions*)

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

D. Hasil Kebijakan (*policy actions*)

Yaitu akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

E. Hasil guna kebijakan

Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu dipecahkan kembali atau perumusan kembali. Jika dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi:

- a. Kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, dan masalah luar negeri),
- b. Kelembagaan (misalnya kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, dan kebijakan departemen), dan
- c. Kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa reformasi, dan kebijakan masa orde baru).

## C. Implementasi Kebijakan

### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012: 148) menyatakan bahwa “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible*)”.

Selanjutnya, menurut Grindle dalam Winarno (2012: 149) mengemukakan bahwa “Implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah”.

Sedangkan, menurut Winarno (2012: 146) menjelaskan bahwa ‘Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Kemudian, menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2020: 150-151) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah *A Model of The Policy Implementation*. Merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksana kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel.

Dari definisi di atas, maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari sebuah proses perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya dan tetap berpegangan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

## **2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan**

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Islamy (2013: 102-106) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu:

1. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan

terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

2. Bersifat *non- self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Sedangkan menurut Hogwood dan Gun dalam Nugroho (2014 : 243)

dalam buku: “*analisis kebijakan: dari formulasi keimplementasi kebijakan negara*” mengemukakan sejumlah implementasi sebagai berikut :

Tahap I terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
- b. Menentukan standar pelaksanaan.
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan:

- a. Menentukan jadwal.
- b. Melakukan pemantauan.
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat di ambil tindakan yang sesuai dan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan. Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang terjadi sesudah suatu program diperlakukan atau dirumuskan yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha administratif maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran, tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik,ekonomi,sosial, yang berpengaruh kepada implementasi kebijakan negara.

### 3. Model-Model Implementasi Kebijakan

Pada bagian sebelumnya, perkembangan studi implementasi kebijakan telah memasuki generasi ke tiga, dimana generasi pertama memperkenalkan pendekatan *top-down*. Model ini merupakan kritikan terhadap model pendekatan *top-down* terkait dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi. Misalnya implementasi harus memperhatikan interaksi antara pemerintah dengan warga Negara Lipsky (Agustino 2020: 47).

Ada beberapa model implementasi kebijakan dari para ahli yang dapat penulis kemukakan dan selanjutnya penulis uraikan sebagai bahan untuk menganalisis penelitian yang sedang dilakukan.

Model yang dikembangkan oleh Model implementasi kebijakan dari Metter dan Horn dalam Agustino (2020: 151-153) model pendekatan mengatakan bahwa masalah utama Administrasi Publik adalah menyarankan untuk memperhatikan enam isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2020: 151-153) dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Standar Ukuran dan Tujuan Kebijakan  
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika – dan - hanya- jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis

dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat cocok dengan para agen pelaksanaannya.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

#### **4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda dilapangan.

Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak

serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

Menurut Rondinelli dan Cheema dalam Erwan dan Dyah (2015: 90) terdapat faktor penghambat Implementasi Kebijakan, diantaranya:

1. Kondisi Lingkungan
2. Hubungan antar organisasi
3. Sumber Daya
4. Karakter institusi implementor.

#### **5. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan**

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan seringkali dihadapkan dengan berbagai hambatan yang dapat mengakibatkan suatu kebijakan tidak terlaksana dengan baik. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat terlaksanakan dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Rondinelli dan Cheema dalam Erwan dan Dyah (2015: 90) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Implementasi Kebijakan, diantaranya:

1. Kondisi Lingkungan
2. Hubungan antar organisasi
3. Sumber Daya
4. Karakter institusi implementor

Adapun penjelasannya berdasarkan deskripsi penulis adalah sebagai berikut:

##### **a. Kondisi Lingkungan**

Pertama, agar pelaksana suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, maka bisa dilihat dari kondisi lingkungan wilayah tersebut dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi dan politik karena kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

b. Hubungan Antar Organisasi

Adanya kerjasama dengan pihak lain yang dapat menguntungkan satu sama lain guna mewujudkan tercapainya sasaran implementasi kebijakan. Menciptakan koordinasi yang baik, seperti persamaan persepsi tentang tujuan kebijakan atau program, sarana komunikasi yang memadai dan persamaan kepentingan.

c. Sumber Daya

Pelaksanaan implementasi sangat tergantung pada aktor lain, fakta yang menunjukkan bahwa prasyarat bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah adanya dukungan sumberdaya yang dibutuhkan, baik itu sumberdaya finansial, teknologi, polituik, informasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

d. Karakter Institusi Implementor

Dalam suatu pelaksanaan Implementasi Kebijakan agar keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik institusi, yang mencakup struktur birokrasi dan norma-norma yang di dalamnya. Semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program atau kebijakan. Respon implementor terhadap kebijakan yang terkait, dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik dan pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan juga yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

**6. Lumbung Pangan Masyarakat**

**a. Pengertian Lumbung Pangan Masyarakat**

Lumbung pangan adalah salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat yang telah lama berperan dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik. Lumbung pangan tersebut tidak hanya efektif dalam melayani kebutuhan pangan anggotanya pada saat krisis tetapi juga melayani kebutuhan finansial anggotanya dari hasil pengelolaan lumbung tersebut. Lumbung pangan telah ada sejalan dengan budaya padi dan menjadi bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Pemenuhannya pun telah dijamin oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1. Kebutuhan pangan dikatakan kebutuhan fundamental karena

jika tidak terpenuhi, maka kehidupan seseorang dapat dikatakan tidak layak. Pemenuhan akan pangan sangat penting karena menentukan kualitas dari sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2012, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Maka dari itu kelembagaan lumbung pangan masyarakat saat ini perlu direkonstruksi peran dan fungsinya serta memperkuat kemampuannya dan juga diharapkan tidak hanya membantu ketahanan pangan masyarakat dalam skala terbatas, namun dalam jangka panjang dapat ditingkatkan lagi menjadi lembaga ekonomi andalan bagi petani dipedesaan.

Adapun pengertian lumbung pangan menurut Mulyono (2008) menyatakan bahwa: "Lumbung pangan sebagai kebutuhan dasar manusia sangat menentukan kelangsungan hidup. Ketidakcukupan pangan berpotensi menguncang stabilitas sosial juga ketahanan nasional".

Menurut Deptan (2010): Mendefinisikan bahwa "Lumbung pangan telah dikenal sebagai salah satu institusi cadangan pangan di pedesaan yang membantu mengatasi kerawanan pangan di masa paceklik dan masa bencana".

Sedangkan Menurut Soemarno MS. (2010), lumbung pangan adalah salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat yang telah lama berperan dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik.

Berdasarkan Penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Lumbung pangan sebagai institusi ketahanan pangan yang telah dikelola masyarakat desa secara turun-temurun yang berfungsi sebagai lembaga cadangan pangan masyarakat untuk mengatasi masa paceklik.

Dalam rangka pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan (Pasal 23 ayat 1) yang mengamanatkan bahwa “dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan cadangan pangan Nasional”. Selanjutnya (Pasal 23 ayat 2) dijelaskan bahwa “Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat”. Pada pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa “Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat”. Kemudian pada ayat 2 "Pemerintah dan Pemerintah daerah memfasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Keberadaan lumbung pangan saat ini umumnya berada di Daerah yang secara tradisional telah mengembangkan lumbung pangan di Daerah rawan pangan dengan kendala aksesibilitas. Keberadaan cadangan pangan, di tingkat masyarakat dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelembagaan pengelolaan cadangan pangan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pemenuhan ketahanan pangan pedesaan tidak lepas dari adanya kelembagaan lumbung pangan Desa yang dapat menampung hasil panen sebelum dijual kepasar dengan harga yang memadai sesuai dengan harapan petani.

Kelembagaan lumbung pangan Desa, yang masih pada tingkatan sederhana dan berorientasi sosial, mempunyai potensi untuk dikembangkan dan direvitalisasi melalui proses pemberdayaan secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perwujudan ketahanan pangan, sehingga lembaga sosial ekonomi masyarakat ini mampu menjadi lembaga penggerak ekonomi pedesaan.

#### **b. Tujuan Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pangan Masyarakat**

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung Pangan untuk menjamin akses, dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
2. Meningkatnya kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan dan;
3. Meningkatnya fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

#### **c. Subsistem Ketahanan Pangan**

Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi 3 (Tiga) subsistem, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Subsistem ketersediaan pangan yang mencakup aspek produksi, aspek cadangan pangan dalam negeri, serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan;
2. Subsistem distribusi pangan yang mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Subsistem distribusi bukan semata-mata menyangkut aspek fisik dalam arti pangan tersedia di semua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga menyangkut aspek masyarakat tersebut;
3. Subsistem konsumsi pangan meliputi upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal.

#### **d. Hambatan dalam Subsistem Ketahanan Pangan**

Adapun hambatan-hambatan yang masih dihadapi dalam ketahanan pangan yaitu sebagai berikut:

1. Subsistem Ketersediaan pangan meliputi perubahan iklim global, ketidakseimbangan produksi dan stok pangan;
2. Subsistem Distribusi pangan meliputi trend harga pangan yang terus meningkat dan lebih bergejolak;
3. Subsistem Konsumsi Pangan meliputi tingginya konsumsi beras per kapita dan menurunnya tingkat konsumsi non beras.

#### **e. Prinsip-Prinsip Pembentukan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat**

Menurut Soemarno MS (2010) dalam pertumbuhan kelompok lumbungpangan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kebebasan, artinya menghargai kepada para individu untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompok yang dikehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu bisa tanpa atau menjadi anggota satu atau lebih kelompok.
2. Keterbukaan, artinya penyelenggaraan kelompok dilakukan secara terbuka baik sesamapengurus maupun dengan anggotanya.
3. Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengembangkan dan mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan penilaian kinerja kelompok). Petani berperan aktif dalam mengelola lumbung pangan dan meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan lumbung pangan tersebut.
4. Keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan penggalan potensi para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumber daya pangan ini dapat terwujud maka dapat terhindar dari kerawanan panganmewujudkan kemandirian kelompok.
5. Kesetaraan, artinya hubungan antara pendamping, pengurus dan anggota harus merupakan mitra sejajar.
6. Kemitraan, artinya penyelenggaraan kegiatankerjasama yang dilaksanakan berdasarkan padaprinsip saling menghargai, salingmenguntungkan, saling memperkuat dan salingmembutuhkan antara kelompok dengan pihak lain.

## **f. Strategi pengembangan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat**

### **Desa**

Strategi Lumbung Pangan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Perbaikan administrasi dan manajemen kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat);
- b. Peningkatan partisipasi anggota kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) dalam kegiatan simpan pinjam sehingga terjadi peningkatan secara berkala;
- c. Perluasan usaha dengan melayani kegiatan penggilingan yang melayani anggota kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat);
- d. Peningkatan jasa bagi anggota kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) dan perlunya perhatian, bantuan dan pembinaan kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat).

### **g. Strategi Penguatan Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa**

Untuk penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat terdapat beberapa strategi yang perlu dikembangkan yaitu, sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah ini dapat ditempuh dengan membuat kebijakan anggaran berbaisi kerakyatan, memfasilitasi, mengatur, menggerakkan, serta memonitor dan mengevaluasi keberadaan lembaga lumbung pangan desa.
2. Meningkatkan potensi sumber daya manusia petani, melalui berbagai pelatihan dan pendidikan melalui penyuluhan pertanian, agar mereka tahu, mau dan mampu mengembangkan potensi lumbung pangan dengan meningkatkan produksi pertanian.
3. Penguatan modal usaha tani, agar petani mampu mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mencapai kapasitas ketahanan pangan masyarakat.
4. Meminimalisir alih fungsi lahan pertanian melalui penyelenggaraan *corporate farming* (CF). Lahan persawahan yang sempit dikonsolidasikan menjadi suatu hamparan yang luasnya menjadi puluhan hektar, sehingga produktivitas lahan bisa ditingkatkan. Bila ini terjadi, penggunaan mesin dan peralatan mesin pertanian secara intensif untuk menggantikan kekurangan tenaga kerja terutama dalam pengolahan tanah dan pemanen dapat lebih efisien.
5. Memabngun hubungan kemitraan yang lebih efektif dan efisien antara kelembagaan lumbung pangan desa dengan Badan Urusan Logistik

(BULOG). Kemitraan tersebut bisa melalui mekanisme jual beli beras dari lumbung ke Bulog dengan harga yang sesuai.

6. Mengembangkan sistem resi gudang (*Warehouse Receipt System*). Dengan sistem ini, petani ataupun pemilik tidak perlu menjual komoditinya sewaktu harga rendah, tetapi masih mendapatkan dana dari perbankan melalui resi gudang yang diterima dari penyimpanan.

#### **h. Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa**

Hermanto (2001:7) menjelaskan bahwa “Kelembagaan lumbung pangan desa merupakan sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola mantap dan terstruktur dalam memenuhi kebutuhan cadangan pangan masyarakat Desa”. Maka dari itu, lumbung pangan masyarakat sebagai institusi penyangga cadangan pangan untuk dikembangkan di setiap Daerah. Keberadaan lumbung pangan masyarakat Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, lumbung pangan tersebut diperlukan sebagai suatu penguatan dan pengembangan kelembagaan untuk mengaktifkan kembali keberadaan lumbung pangan desa. Keberadaan lumbung pangan mempunyai manfaat bagi masyarakat yang ada di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, sebagai penyimpanan benih dari hasil panen yang disisihkan untuk dipilih mana yang berkualitas untuk dijadikan benih. Dapat mengatasi adanya bencana alam, gagal panen yang disebabkan kondisi alam atau serangan hama. Petani memiliki tabungan padi atau gabah pada masa musim paceklik sehingga kebutuhan masyarakat Desa Suriamedal akan tetap tercukupi. Dan sebagai instusi ekonomi lumbung pangan masyarakat Desa Suriamedal dalam menangani kredit dan permodalan petani atau anggota lumbung yang sudah bergabung dalam kelompok tani di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang. Begitupun dengan adanya

kelembagaan lumbung pangan masyarakat tersebut dapat memupuk rasa kekeluargaan dan gotong royong masyarakat Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten sumedang dalam menjaga dan mengembangkan keberadaan lumbung pangan masyarakat.

#### **i. Fungsi Pembentukan Kelompok Tani**

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, maka pembinaan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian dilaksanakan dalam wadah kelembagaan kelompok tani. Menurut peraturan tersebut, yang harus diperhatikan dalam pembentukan kelompok tani adalah kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai dan keserasian hubungan antar anggota untuk kelestarian kehidupan berkelompok, sehingga setiap anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat dari setiap kegiatan.

Kelompok tani memiliki beberapa fungsi yang mendasari penyusunan kelompok dan kegiatan usahanya. Fungsi kelompok tani yaitu sebagai berikut:

1. Kelas Belajar  
Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik.
2. Wahana Kerjasama  
Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, serta lebih menguntungkan.
3. Produksi  
Usahatani setiap anggota kelompok tani secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

## **j. Karakteristik Kelompok Tani**

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di perdesaan yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani, memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota.
2. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani.
3. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
4. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.
5. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya.
6. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya.
7. Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya.
8. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-kurangnya sebagian besar anggotanya.
9. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.

## **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Pada penyusunan penelitian skripsi ini, peneliti terlebih dahulu mempelajari penelitian terdahulu yang berupa skripsi yang memiliki kesamaan variabel penelitian dengan yang peneliti ajukan. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah peneliti dan mempertimbangkan dalam penyusunan skripsi yang dilakukan. Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk deskripsi di bawah ini.

Penelitian pertama, disusun oleh Febi Rizia (2018) Universitas Andalas dengan judul penelitian “Implementasi Program Pengembangan lumbung pangan masyarakat di kabupaten Pasaman Barat”. Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi program yang dijalankan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih adanya hambatan dalam Pengelolaan lumbung pangan pada pengembangan lumbung masih terbatas, meskipun hal tersebut tidak serta merta berlaku pada keseluruhan lumbung pangan yang ada.

Penelitian kedua, disusun oleh Tri Bayu (2018) Universitas Mataram dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat Dalam Menggelola Cadangan Pangan Ditinjau Dari Undang-undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor yang memengaruhi kebijakan adalah faktor internal dan eksternal. Seperti pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sangat cepat membuat kebutuhan beras sebagai makanan pokok meningkat. Sehingga menghambatnya kebijakan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam ini menyebabkan pengelola cadangan pangan tersebut tidak mencapai tujuan kebijakan.

Penelitian ketiga, disusun oleh Nita Nurmalitasari (2018) Perguruan Tinggi Sebelas April Sumedang Prodi Administrasi Negara dengan judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Situ Kabupaten Sumedang. Hasil penelitiannya adalah penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Situ Kabupaten Sumedang belum terlaksana dengan baik. Hal ini didasarkan pada 5T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas).

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan masih terdapatnya permasalahan atau hambatan dari faktor eksternal ataupun internal yang mempengaruhi keberhasilan suatu program. Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kelayakan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat Di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Surian. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang disajikan ke dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Implementasi Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Di Kabupaten Pasamaan Barat Febi Rizia Nada Universitas Andalas, 2018.	Variabel penelitian yakni Implementasi Kebijakan  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan seperti observasi, dokumentasi  Metode penelitian kualitatif	Dimensi dan indikator yang digunakan berbeda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi program yang dijalankan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih adanyahambatan dalam Pengelolaan lumbung pangan pada pengembangan lumbung masih terbatas, meskipun hal tersebut tidak serta merta berlaku pada keseluruhan lumbung pangan yang ada.
2.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat Dalam Menggelola Cadangan Pangan Ditinjau Dari Undang-undang 18 Tahun 2012 Tentang	Variabel penelitian yakni Implementasi Kebijakan  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian	Dimensi dan indikator yang digunakan berbeda	Faktor yang memepengaruhi kebijakan adalah faktor internal dan eksternal. Seperti pertumbuhan penduduk NTB yang sangat cepat membuat kebutuhan

	Pangan Tri Bayu Ramadhan Universitas Mataram, 2018.	ini yaitu studi kepastakaan dan studi lapangan seperti observasi, dokumentasi  Metode penelitian kualitatif		beras sebagai makanan pokok meningkat. Sehingga menghambatnya kebijakan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam ini menyebabkan pengelola cadangan pangan tersebut tidak mencapai tujuan kebijakan.
3.	Implementasi Program Bantuan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Situ Kabupaten Sumedang  Nita Nurmalitasari  Perguruan Tinggi Sebelas April Sumedang Prodi Ilmu Administrasi 2018.	1. Menggunakan metode kualitatif 2. Sama mengenai pengaji mengenai implementasi kebijakan	1. Lokus penelitian 2. Tujuan penelitian 3. Kajian program	Penerapan program BPNT di Kelurahan Situ Kabupaten Sumedang belum terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan pada 5T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas)

Berdasarkan uraian diatas, maka relevansi hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengukur tentang implementasi kebijakan publik namun dengan sasaran dan program kebijakan yang berbeda. Lebih lanjut peneliti kembangkan melalui pendekatan dan parameter ukur yang berbeda sehingga penelitian Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat ini secara konsep dan teori masih bersifat orsinil karena variabel atau alat ukur yang diteliti berbeda.

## E. Kerangka Pemikiran dan Kisi-kisi Instrumen Penelitian

### 1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengukur tentang bagaimana peraturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pasal 1 tentang pangan menyatakan bahwa cadangan

pangan nasional merupakan ketersediaan pangan yang ada di wilayah Indonesia sebagai produk konsumsi manusia serta sebagai antisipasi gangguan pasokan dan harga, kekurangan pangan, dan keadaan darurat, dapat diimplementasikan di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini baik dan buruknya pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari peran serta para implementor terkait dengan penerapan lumbung pangan masyarakat yang ada untuk itu, diperlukan petugas yang terampil dan didukung dengan sarana yang memadai sehingga dapat menunjang dalam pencapaian kebijakan.

Model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn dalam Agustino (2020: 151-153) menyatakan bahwa terdapat beberapa dimensi yang menentukan berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan dalam sebuah program yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

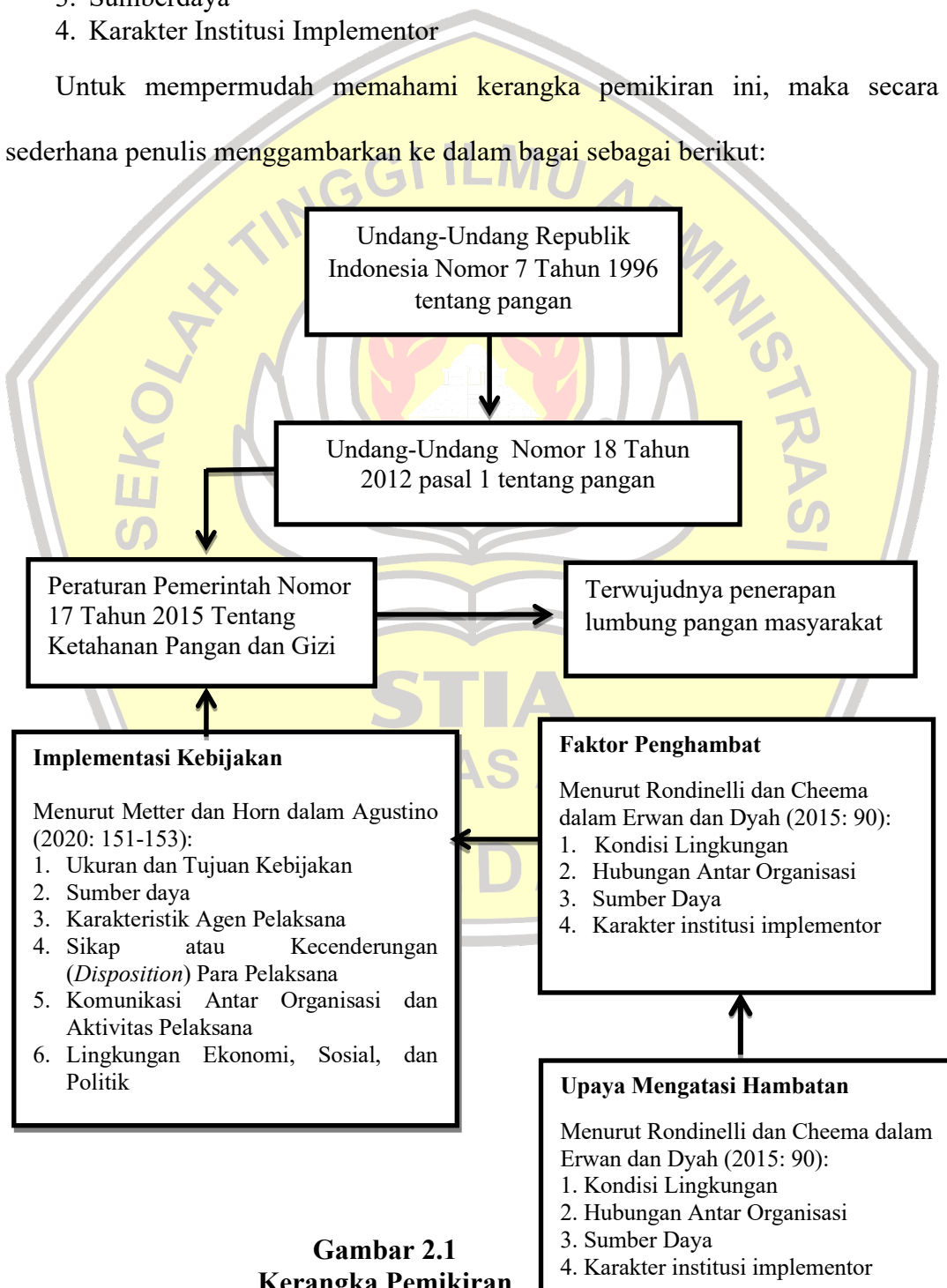
Namun dalam Implementasi Kebijakan ini Menurut Rondinelli dan Cheema dalam Erwan dan Dyah (2015: 90) terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan
2. Hubungan Antar Organisasi
3. Sumberdaya
4. Karakter Institusi Implementor

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan tersebut Menurut Rondinelli dan Cheema dalam Erwan dan Dyah (2015: 90) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya:

1. Kondisi Lingkungan
2. Hubungan Antar Organisasi
3. Sumberdaya
4. Karakter Institusi Implementor

Untuk mempermudah memahami kerangka pemikiran ini, maka secara sederhana penulis menggambarkan ke dalam bagai sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**  
 Sumber: Dikembangkan Untuk Penelitian,2021

## 2. Kisi-Kisi Pertanyaan

Untuk pembahasan selanjutnya, maka peneliti memberikan kisi-kisi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kisi-Kisi Instrumen Penelitian**

NO	Fokus Masalah	Fokus Teori	Indikator	Item
1.	Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat Menurut Metter & Horn dalam Agustino (2020: 151-153)	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Kejelasan ukuran keberhasilan	1
			b. Adanya tujuan kejelasan	2
		2. Sumber daya	a. Sumber Daya Manusia	3
			b. Anggaran/Biaya	4
			c. Sarana dan Prasarana	5
		3. Karakteristik Agen Pelaksana	a. Keseimbangan cakupan luas wilayah dengan jumlah agen pelaksana	6
			b. Adanya tanggungjawab	7
	4. Sikap atau Kecenderungan ( <i>Disposition</i> ) Para Pelaksana	a. Respon agen pelaksana dan masyarakat	8	
	5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	a. Adanya koordinasi	9	
		b. Kejelasan Informasi	10	
	6. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik	a. Faktor Lingkungan	11	
		b. Pandangan masyarakat	12	
2	Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat Menurut Rondinelli dan Cheema dalam Erwan dan Dyah (2015: 90)	1. Kondisi Lingkungan	a. Belum stabilnya kondisi lingkungan (ekonomi, sosial, geografis dan politik)	13
		2. Hubungan Antar Organisasi	a. Kurangnya intensitas pemberian informasi	14
			b. Kurangnya koordinasi	15
		3. Sumberdaya	a. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat	16
b. Kurangnya dukungan finansial	17			
	4. Karakter Institusi Implementor	a. Kurangnya pemahaman Implementor	18	
		b. Kurangnya pengawasan dari		

			pimpinan	19
3	Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat Menurut Rondinelli dan Cheema dalam Erwan dan Dyah (2015: 90)	1. Kondisi Lingkungan	a. Stabilitas kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, geografis dan politik)	20
		2. Hubungan Antar Organisasi	a. Intensitas informasi terpenuhi	21
			b. Terciptanya koordinasi yang baik	22
		3. Sumberdaya	a. Dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas	23
b. Dukungan sumberdaya finansial	24			
4. Karakter Institusi Implementor	a. Pemahaman implementor	25		
	b. Meningkatkan pengawasan dari pimpinan	26		



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Pengertian metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2020: 2) sebagai berikut:

“Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Adapun metode penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Dukeshire & Thurlow dalam Sugiyono (2020: 3) bahwa:

“Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan fokus grup, *interview* secara mendalam, dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data”.

Menurut William dalam Moleong (2011: 5) mengemukakan metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada satu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2011: 8-13) memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut.

1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai alat (*instrumen*)
3. Metode kualitatif
4. Analisis data secara induktif
5. Teori dan dasar (*grounded theory*)
6. Deskriptif
7. Lebih mementingkan proses dari pada hasil
8. Adanya “batas” yang ditentukan oleh focus
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
10. Desain yang bersifat sementara
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Berdasarkan pengertian menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sebuah objek untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata maupun tulisan yang dapat diamati dan datanya bersifat induktif.

Dalam penelitian ini yang diamati adalah pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat yang diselenggarakan di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang di dapat lebih lengkap, bermakna dan pasti sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi agar tujuan penelitian dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan desain penelitian dibawah ini yaitu sebagai berikut:

**Indikasi Permasalahan:**

1. Masih Kurang stabilnya faktor lingkungan yang dapat menghambat proses pelaksanaan lumbung pangan di Desa Suriamedal.
2. Masih kurangnya koordinasi antara pengelola dengan pihak Desa terkait pengelolaan lumbung di Desa Suriamedal.
3. Belum adanya sosialisai dari pihak Desa kepada masyarakat mengenai lumbung pangan.

**Fokus Permasalahan:**

1. Implementasikebijakan penerapan lumbung pangan masyarakat.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan penerapan lumbung pangan masyarakat.
3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan penerapan lumbung pangan masyarakat.

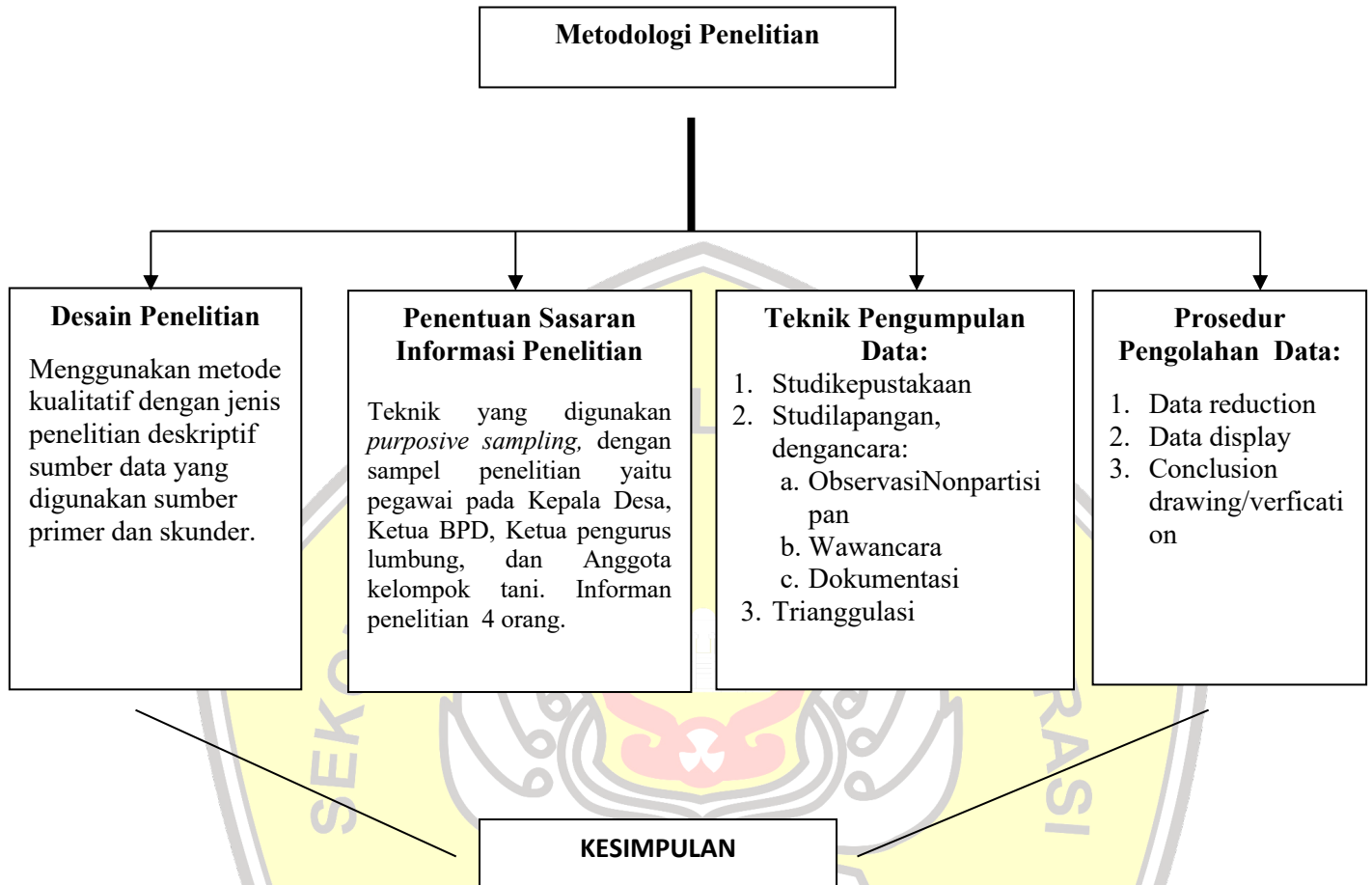
**Teori yang digunakan :**

Implementasi kebijakan penerapan lumbung pangan masyarakat, Menurut Metter & Horn dalam Agustino (2020: 151-153):

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor Penghambat dan Upaya Menurut Rondinelli dan Cheema dalam Erwan dan Dyah (2015: 90):

1. Kondisi Lingkungan
2. Hubungan Antar Organisasi
3. Sumberdaya
4. Karakter Institusi Implementor



**Gambar 3.1**  
**Desain Penelitian**

## B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian

### 1. Penentuan Sasaran

Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan, itu

semuanya tidak dapat ditemukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dipertimbangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tapi oleh Spradley dalam Sugiyono (2020: 91) dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Kaur Tata Usaha dan Umum	1
4.	Kaur Perencanaan	1
5.	Kaur Keuangan	1
6.	Kasi Pemerintahan	1
7.	Kasi Pelayanan	1
8.	Kasi Kesejahteraan	1
9.	Kawil	2
<b>Jumlah</b>		10

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

## 2. Informan Penelitian

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat serta data, diperoleh dari informan serta sampel. Informan adalah orang yang benar-benar memahami

permasalahan dengan argument bahwa mereka mengetahui banyak mengenai fenomena yang terjadi dilapangan, sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020: 96). Artinya yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah mereka yang ada hubungannya dengan proses Pelaksanaan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.

Maka, yang menjadi informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Pengurus Lumbung dan Anggota Kelompok Tani di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang yang berjumlah 4 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah Orang
1.	Kepala Desa	1
2.	Ketua BPD	1
3.	Ketua Pengurus Lumbung	1
4.	Anggota Kelompok Tani	1
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling setrategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Oleh karena itu untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan peneliti melalui sumber-sumber yang akurat dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan meneliti secara mendalam yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan mengenai objek yang diteliti, dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendalami masalah-masalah yang terjadi.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meminta penjelasan kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta terarah sesuai dengan pedoman wawancara.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data berupa rekaman hasil wawancara, foto-foto, catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara dan observasi.

3. Triangulasi

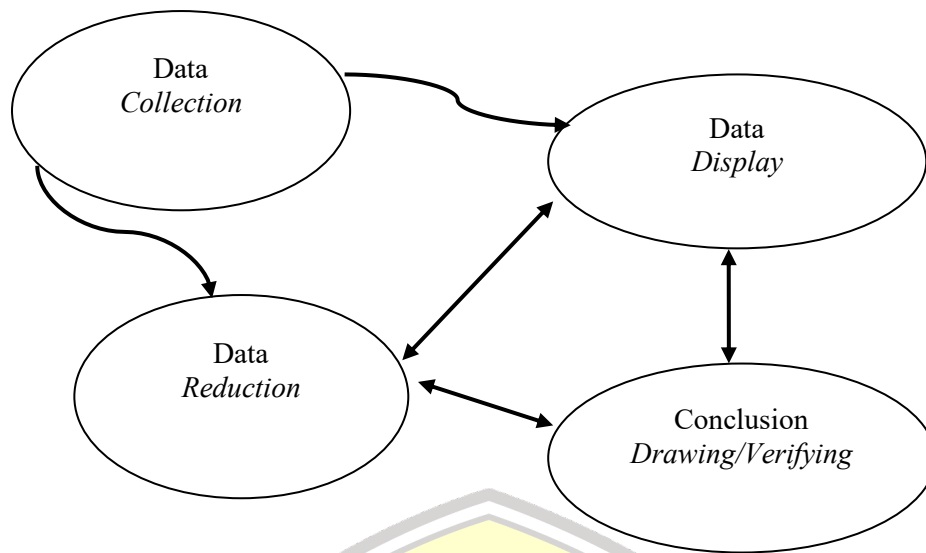
Merupakan teknik pengolahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulam data serta sumber data yang telah ada. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan.

#### **D. Prosedur Pengolahan Data**

Untuk mengolah data dari hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis dan Model Mailes dan Huberman dalam Sugiono (2020: 134). Adapun prosedur pengolahan data hasil penelitian sesuai dengan teknik analisis data Model Mailes dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)  
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis merangkum hasil wawancara dari informan.
2. *Data Display* (Penyajian Data)  
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, sehingga data yang dilakukan cenderung bersifat naratif. Dalam penelitian ini penulis menyajikan data hasil wawancara dengan memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti.
3. *Conclucion Drawing/Verification*  
Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang berupa deskripsi atau gambaran dari objek penelitian dan didukung oleh data-data yang akurat. Kesimpulan ini pada akhirnya dapat dijadikan hipotesis penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka analisis data tersebut diatas menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020: 134) digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.2**  
**Posedur Pengolahan Data**  
 Sumber: Sugiyono, 2020

#### **E. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus Penelitian adalah Penerapan Lumbung Pangan di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang. Penelitian ini dilaksanakan ini dilaksanakan di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang. Dengan jadwal penelitian sebagai berikut:

**STIA**  
**SEBELAS APRIL**  
**SUMEDANG**



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV (empat) sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang sudah dapat dikatakan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya sempurna. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan penerapan lumbung pangan masyarakat masih belum sepenuhnya berpartisipasi, sehingga masih ada masyarakat yang belum ikut serta menjadi anggota kelompok tani dan memiliki kartu tani.
2. Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang diukur berdasarkan teori Metter dan Horn dalam Agustino (2020: 151-153).
3. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang tidak begitu signifikan hanya sebatas keterbatasan waktu untuk mengsosialisasikan penerapan lumbung pangan masyarakat. Kondisi ini tentunya hanya untuk dukungan pemerintah serta secara kelembagaan harus memiliki personil yang memahami betul mengenai program tersebut.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat dalam pengelolaan yaitu:

- a. Kondisi lingkungan
  - b. Kurangnya koordinasi
  - c. Kurangnya partisipasi masyarakat
4. Untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Perlunya upaya dalam pengembangan kebijakan penerapan lumbung pangan masyarakat di Desa Suriamedal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Suriamedal sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat terutama di sektor pertanian. Adapun upaya-upaya yang dilkakukan yaitu:
- a. Stabilitas Lingkungan (ekonomi, sosial, geografis dan politik) adalah kestabilan hubungan antara kondisi geografis dengan kekayaan alam, sumber kekayaan alam perlu didata lokasi penyebaran dan potensinya di seluruh wilayah Desa. Karena di dalam perencanaan dan pemanfaatan kekayaan alam itu, kedekatan suatu usaha industri dengan sumber bahan baku, misalnya sangat menguntungkan dari sisi biaya produksi (biaya rendah) yang pada akhirnya akan menentukan tingkat harga yang dapat menjangkau oleh masyarakat sekaligus daya saing produk tersebut.
  - b. Terciptanya koordinasi yang baik, memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu atau proses menyamakan segala

kegiatan dan aktivitas dalam pekerjaan santara individu-individu lainnya untuk mencapai tujuan setiap pihak sekaligus tujuan bersama.

c. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Salah satu keberhasilan suatu kebijakan yaitu dukungan dari kualitas sumber daya manusianya sehingga kebijakan berjalan dengan semestinya dan tingkat partisipasi masyarakat pun akan tinggi.

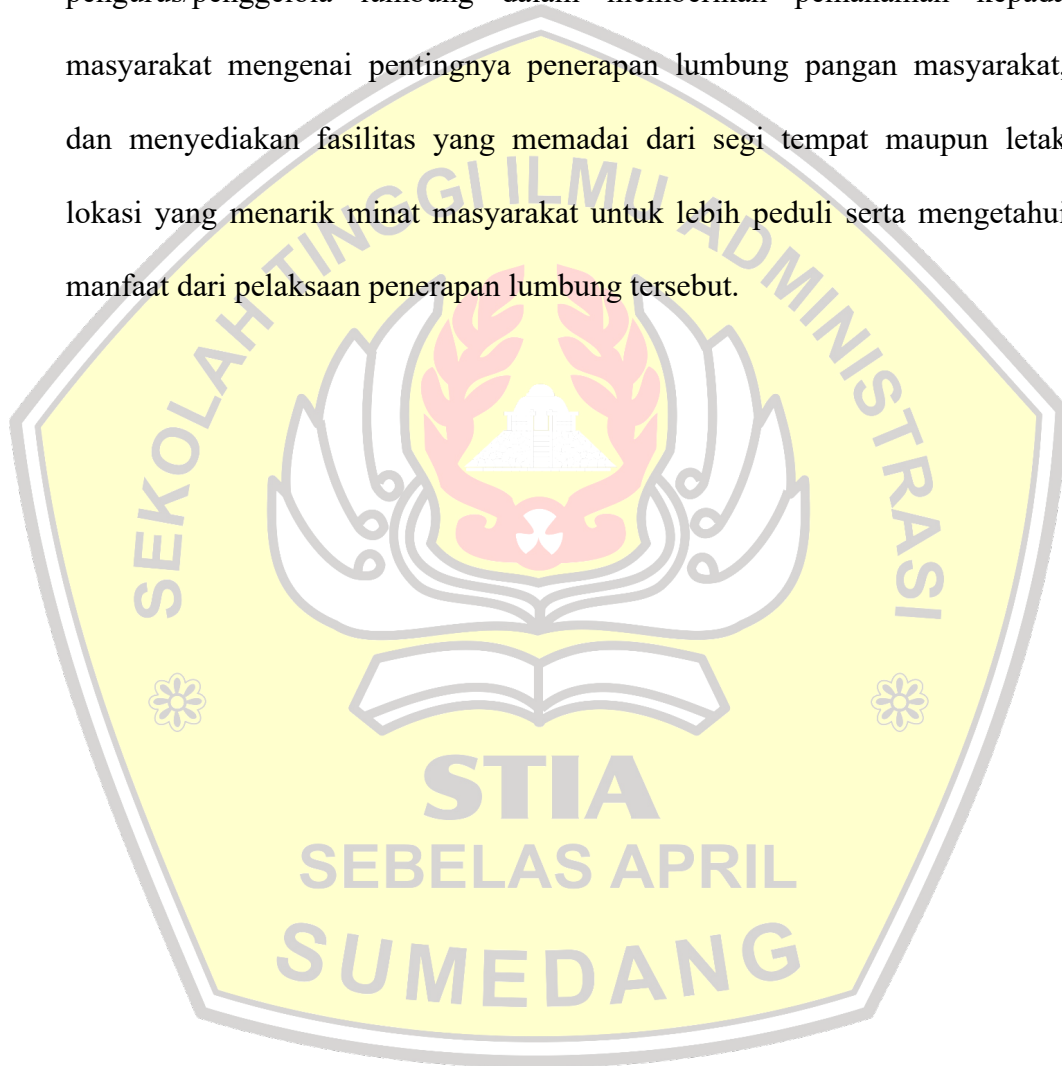
5. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penerapan Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat Desa Suriamedal yang masih belum sepenuhnya ikut serta dalam pelaksanaan penerapan lumbung pangan masyarakat, begitupun dari pihak Desa dan pengurus/pengelola lumbung itu sendiri belum mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerapan lumbung tersebut. Serta masih kurangnya dukungan finansial yaitu dana dari Pemerintah yang masih belum merata secara keseluruhan pada lumbung yang ada di setiap Rw.

## **B. Saran**

Pada akhirnya peneliti menuliskan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Agar lebih ditingkat lagi dalam sosialisasi mengenai lumbung kepada masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.

2. Sebaiknya pendanaan atau anggaran baik itu dari Pemerintah atau Desa harus lebih diperhatikan untuk pelaksanaan penerapan lumbung pangan masyarakat, agar program dari Desa dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.
3. Lebih meningkatkan sumber daya manusia baik dari aparatur Desa atau pengurus/pengelola lumbung dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan lumbung pangan masyarakat, dan menyediakan fasilitas yang memadai dari segi tempat maupun letak lokasi yang menarik minat masyarakat untuk lebih peduli serta mengetahui manfaat dari pelaksanaan penerapan lumbung tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi revisi I Kee-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dyah, Erwan. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Cetakan II*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fhatoni, Abdurrahmat. 2009. *Organisasi Dan Manajemnen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Handoko, Hani T. 1999. *Dasar-dasar manajemen produksi dan operasi*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indradi, SjamsiarSjamsuddin. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing Wisma Kalimetro.
- Islamy, Irfan. 2013. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Mufiz, Ali. 2011. *Materi Pokok Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Banten: ISBN.
- Moleong, L.J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Revida, Dkk. 2020. *Teori Administrasi Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Safaria, A. Friday, Sumiati, S., & Karwati, T. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 92-100.

Retrieved from

<https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/74>

Siagian, Sondang P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.



Silalahi, Ulbert. 2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

STIA Sebelas April Sumedang. 2015. *Buku Panduan penulis Skripsi*. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.

Thoha, Miftah. 1997. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: CV. Rajawali.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

## **B. Dokumen-dokumen**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pasal 1 tentang pangan
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 23 ayat 1)
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Cadangan Pangan (Pasal 23 ayat 21)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani

## **C. Sumber lain**

Nada, Razia Febi. 2018. *Implementasi Program Penegembangan Lumbung Pangan Masyarakat Di Kabupaten Pasamaan Barat*, Universitas Andalas.

Bayu, Tri. 2018. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat Dalam Mengelola Cadangan Pangan Ditinjau Dari Undang-Undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, Universitas Mataram.

Nurmalitasari, Nita. 2018. *Implementasi Program Bantuan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Situ Kabupaten Sumedang: Skripsi Penelitian Kualitatif* : STIA Sebelas April Sumedang.

Ikbal Bahua, Mohamad. 2011. *Strategi Penguatan Lumbung Pangan Desa Dalam Menunjang Pemenuhan Ketahanan Pangan*. Informasi, 16 (2), 273-283.

- Jurnal Ekonomi Pembangunan. 2008. *Ketahanan pangan: situasi, permasalahan, Kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat.*  
Tersedia: <https://journals.ums.ac.id/JEP/article/view/1028/701> [07 Januari 2020]
- Jurnal Geografi. 2019. *Pengembangan Potensi Lumbung Pangan Desa Sebagai Sarana Penguatan Ketahanan Pangan di Wilayah Kabupaten Kediri.*  
Tersedia <https://www.researchgate.net/publication/345805230> [07 Januari 2020].

